

**PENGADILAN NEGERI
TANGERANG
LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER II TAHUN 2021
SATKER 097598**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



Alamat :

Jalan TMP.Taruna No.7

Tangerang 15118

Telp. 021-5524157

email :pn.tanggerang@gmail.com

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Tangerang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Tangerang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tangerang, 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

RINI SUMARNINGSIH, SH., MM.
NIP. 196201061987032001

	Hal
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis PN Tangerang	9
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3. Basis Akuntansi	11
A.4. Dasar Pengukuran	10
A.5. Kebijakan Akuntansi	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	23
B.2. Belanja	24
B.3. Belanja Pegawai	25
B.4. Belanja Barang	25
B.5. Belanja Modal	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar	27
C.2. Aset Tetap	28
C.3. Kewajiban	29
C.4. Ekuitas	29
D. Penjelasan Atas Pos Laporan Operasional	30
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	30
D.2. Beban Pegawai	30
D.3. Beban Persediaan	31
D.4. Beban Barang dan Jasa	32
D.5. Beban Pemeliharaan	32
D.6. Beban Perjalanan Dinas	33
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	33
D.8. Beban Bantuan Sosial	34
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	34
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	34
D.11. Beban Lain-lain	35
D.12. Kegiatan Non Operasional	35
D.13. Pos Luar Biasa	36

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1. Ekuitas Awal	37
E.2. Surplus (defisit) LO	37
E.3. Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	37
E.4. Transaksi Antar Entitas	38
E.5. Ekuitas Akhir	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	40
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	40
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	40
F.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	40
F.4. Rekening Pemerintah	40
F.5. Pengungkapan Titipan Pihak Ketiga	40
F.6. Pengungkapan Revisi DIPA	41
F.7. Pengungkapan Lain-lain	42
F.8. Pengungkapan Hibah Langsung	43
DATA PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN	

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020	4
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	5
Tabel 3 : Laporan Operasional Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020	6
Tabel 4 : Laporan Perubahan Ekuitas Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020	8
Tabel 5 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP Per 31 Desember 2021	23
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi PNBP Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020	24
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020	24
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020	25
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020	25
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020	26
Tabel 11 : Perbandingan Belanja Modal Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020	27
Tabel 12 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	28
Tabel 13 : Rincian Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	29
Tabel 14 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP Per Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	31
Tabel 15 : Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	32
Tabel 16 : Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	32
Tabel 17 : Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	33
Tabel 18 : Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	34

Tabel 19	: Rincian Beban Perjalanan dinas Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	34
Tabel 20	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	35
Tabel 21	: Rincian kegiatan non operasional Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	36
Tabel 22	: Rincian koreksi nilai persediaan Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	39
Tabel 23	: Rincian transaksi nilai antar entitas	40



Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. TMP.Taruna No.7 Tangerang - Banten 15118

. 021-5524157 Fax : 021-5524158 email : pn.tanggerang@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tangerang, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



ARINI SUMARNINGSIH, SH, MM
NIP. 196201061987032001

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang Semester II per 31 Desember Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 159.091.572 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya- LRA sebesar Rp.0,-.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 21.949.647.838,- atau mencapai 96.16 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.22.828.345.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan

disajikan sebesar Rp. 239.886.501.598 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 38.243.680,-, Aset Tetap sebesar Rp. 239.886.501.598,-, Piutang Jangka Panjang Rp. 0,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 239.924.746.278,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 141.083.035,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 27.874.879.056,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 27.733.796.021,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 28.300.204,- dan sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Suplus/ (Defisit)-LO sebesar (Rp 27.705.495.817,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 244.399.759.483,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 27.705.495.817,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 23.293.626.862,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Desember 2021 adalah senilai Rp. 239.924.745.278,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 1
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN
31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Sem II TA 2021		Sem II TA 2020	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		0	159.091.572	0	45.253.000
Jumlah Pendapatan		0	159.091.572	0	45.253.000
BELANJA					
1. Belanja Pegawai		18.810.677.000	18.294.598.379	97.26	16.741.569.000
2. Belanja Barang		3.752.668.000	3.392.154.459	90.39	2.907.336.643
3. Belanja Modal		265.000.000	262.895.000	99.21	24.950.960
Jumlah Belanja		22.828.345.000	21.949.647.838	96.15	19.519.341.972

Tabel 2.
NERACA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN
31 DESEMBER 2020

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2021	31 DES 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	Rp 0	Rp 0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	Rp 0	Rp 0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	Rp 0	Rp 0
Jumlah Kas dan Bank		Rp 0	Rp 0
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5	Rp 0	Rp 0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TPA	C.1.7	Rp 0	Rp 0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.1.8	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR	C.1.9	Rp 0	Rp 0
Jumlah Piutang (Bersih)		Rp 0	Rp 0
Belanja Dibayar Dimuka	C.1.10	Rp 0	Rp 0
Persediaan	C.1.11	Rp 38.243.680	Rp 50.891.300
Jumlah Aset Lancar		Rp 38.243.680	Rp 50.891.300
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	Rp 151.795.450.000	Rp 151.795.450.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	Rp 11.880.836.411	Rp 10.670.955.815
Gedung dan Bangunan	C.2.3	Rp 104.801.812.825	Rp 104.801.812.825
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	Rp 49.610.000	Rp 49.610.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	Rp 12.475.741	Rp 12.285.741
KDP	C.2.6	Rp 0	Rp 0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Rp (28.653.683.379)	Rp (22.874.690.958)
Jumlah Aset Tetap		Rp 239.886.501.598	Rp 244.455.423.423
Piutang Jangka Panjang	C.3		
TPA	C.3.1	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	C.3.2	Rp 0	Rp 0
TP/TGR	C.3.3	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.4	Rp 0	Rp 0
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		Rp 0	Rp 0
Aset Lainnya	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	Rp 0	Rp 0
Aset Lain-Lain	C.4.2	Rp 501.872.000	Rp 105.500.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(Rp. (501.872.000))	Rp (105.500.000)
Jumlah Aset Lainnya		Rp 0	Rp 0
JUMLAH ASET		Rp 239.924.746.278	Rp 244.506.314.723
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	Rp 0	Rp 96.263.573
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	Rp 0	Rp 10.291.667
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.3	Rp 0	Rp 0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.4	Rp 0	Rp 0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 0	Rp 106.555.240
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 0	Rp 106.555.240
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	Rp 0	Rp 0
Cadangan Persediaan	C.6.2	Rp 38.243.680	Rp 50.891.300
Dana yang Harus Disediakan utk Pembayaran Utang Jk Pendek	C.6.3	Rp 0	Rp 0
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.4	Rp 0	Rp 0
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.5	Rp 0	Rp 0
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		Rp 0	Rp 0
Ekuitas Dana Investasi	C.7		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.1	Rp 239.886.501.598	Rp 244.399.759.483
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.2	Rp 0	Rp 0
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		Rp 239.886.501.598	Rp 244.399.759.483
JUMLAH EKUITAS DANA		Rp 239.924.745.278	Rp 244.399.759.483
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		Rp 239.924.745.278	Rp 244.506.314.723

III. LAPORAN OPERASIONAL

Tabel 3
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021 DAN
31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan		31 DES 2021	31 DES 2020
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional				
Pendapatan Perpajakan				
Jumlah Pendapatan Perpajakan	D.1		0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya			141.083.095	32.253.000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2		141.083.095	32.253.000
Jumlah Pendapatan Operasional			141.083.095	32.253.000
Beban Operasional				
Beban Pegawai	D.	3	18.246.469.625	16.635.003.887
Beban Persediaan	D.	4	95.573.480	52.760.160
Beban Barang dan Jasa	D.	5	2.176.346.506	1.920.990.356
Beban Pemeliharaan	D.	6	1.090.566.334	858.879.720
Beban Perjalanan Dinas	D.	7	31.522.000	36.060.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.	8	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.	9	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.	10	6.228.769.171	6.082.798.290
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.	11	0	0
Beban Lain-lain	D.	12	0	0
Jumlah Beban Operasional			27.856.721.016	25.586.492.413
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			(27.715.637.981)	(25.554.239.413)
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.	13	28.300.000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.	14	0	0
Jumlah Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			28.300.000	0

Laporan Keuangan PN TANGERANG SEMESTER II Tahun 2021

Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasioanl Lainnya					
	Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasioanl Lainnya	D.	15	204	249.500
	Beban Dari Kegiatan Non Operasioanl Lainnya	D.	16	0	794.000
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				28.300.204	(544.500)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				0	0
Pos Luar Biasa					
	Pendapatan PNBPN	D.	16	0	0
	Beban Perjalanan Dinas	D.	17	0	0
	Beban Persediaan	D.	18	0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL				(27.705.495.817)	(25.554.783.913)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tabel 4
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2021 DAN
31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan		31 DES 2021	31 DES 2020
EKUITAS AWAL	E.	1	244.399.759.483	250.420.746.091
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.	2	(27.705.495.817)	(25.554.783.913)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			63.145.250	2.708.333
Penyesuaian Nilai Aset	E.	3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.	4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.	5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.	6	63.145.250	0
Koreksi Lain-lain	E.	7	0	2.708.333
Jumlah Lain-lain			0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.	8	23.293.626.862	19.531.088.972
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS	E.	9	(4.475.014.205)	(6.020.986.608)
EKUITAS AKHIR	E.	10	239.924.745.278	244.399.759.483

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tangerang

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Tangerang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Tangerang berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui pelayanan hukum prima, cepat, transparan dan akuntabel;
- 2) Tersedianya tenaga administrasi Yustisial dan Tehnis yang profesional;
- 3) Meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat mengenai hukum umum yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tangerang;
- 4) Terciptanya situasi yang kondusif dan aman dilingkungan masyarakat;
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Tangerang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Tangerang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sejak Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan

andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten	20

Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Tangerang mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah Rp.
159.091.572.

B.1. Pendapatan Negara Dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 159.091.572,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	28.300.000	0
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	130.791.368	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	204	0
	Total Pendapatan	0	159.091.572	0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Periode yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.113.838.572 atau 233.88 persen dibandingkan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena:

1. Meningkatnya pendapatan sewa tanah dan gedung bangunan; dan
2. Meningkatnya pendapatan pendapatan dari pemindahtanganan BMN;

Perbandingan realisasi PNBP semester II TA 2021 dan semester II 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6.
Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan dari Pemadahtanganan BMN lainnya	28.300.000	0	28.300.000	100
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	130.791.368	45.253.000	85.538.368	189
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	204	0	204	100
Total Pendapatan		159.091.572	45.253.000	113.838.572	233.88

Realisasi Belanja Negara Rp. 21.949.647.838.

B.2. Belanja

Realisasi belanja Kantor Pengadilan Negeri Tangerang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 21.949.647.838 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 96.15 persen dari anggaran senilai Rp. 22.828.345.000 Anggaran dan realisasi belanja semester II TA 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 7.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2021

Kode Jenis	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	18.810.677.000	18.294.598.379	97.26
52	Belanja Barang	3.752.668.000	3.392.154.459	90.39
53	Belanja Modal	265.000.000	262.895.000	99.21
Jumlah		22.828.345.000	21.949.647.838	96.15

Realisasi belanja semester II TA 2021 sama dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar (Rp. 2.430.305.866), secara persentase juga mengalami kenaikan sebesar 12.45 %. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Pagu anggaran pada tahun anggaran 2021 lebih banyak

Perbandingan realisasi belanja semester II TA 2021 dan 2020 dapat dilihat

pada Tabel berikut ini :

Tabel 8
Perbandingan realisasi Belanja 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2020

Kode Jenis Belanj	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		31 Des 2021	31 Des 2020	Rp	%
51	Belanja Pegawai	18.294.598.379	16.587.054.369	1.707.544.010	10.29
52	Belanja Barang	3.392.154.459	2.907.336.643	484.817.816	16.68
53	Belanja Modal	262.895.000	24.950.960	237.944.040	953.64
	Jumlah	21.949.647.838	19.519.341.972	2.430.305.866	12.45

Belanja Pegawai
Rp.
18.294.598.379.

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai semester II TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.294.598.379 dan Rp. 16.587.054.369. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berdasarkan tabel di bawah terdapat kenaikan belanja pegawai pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 yang disebabkan :Adanya penambahan pegawai

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji pokok PNS	6.666.588.900	6.533.622.300	132.966.600	2.03
Belanja pemb. gaji PNS	90.399	87.060	3.339	3.83
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	450.683.392	440.015.375	10.668.017	2.42
Belanja Tunj.Anak PNS	119.786.753	112.480.656	7.306.097	6.50
Belanja Tunj.Struktural PNS	64.750.000	62.725.000	2.025.000	3.23
Belanja Tunj. Fungsional PNS	8.253.585.000	7.107.075.000	1.146.510.000	16.13
Belanja Tunj. PPh PNS	1.293.826.804	1.015.867.957	277.958.847	27.36
Belanja Tunj.Beras PNS	308.219.520	261.146.520	47.073.000	18.03
Belanja Uang makan PNS	1.083.509.000	1.003.215.000	80.294.000	8
Belanja Tunj.umum PNS	51.320.000	50.820.000	500.000	0.98
Realisasi Belanja Bruto	18.295.729.768	16.587.054.868	1.708.674.900	10.30
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>1.131.389</i>	<i>499</i>	<i>1.130.890</i>	<i>226.631</i>
Realisasi Belanja Netto	18.294.598.379	16.587.054.369	1.707.544.010	10.29

Belanja Barang
Rp.
3.392.154.459.

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2021 dan semester II TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.392.154.459 dan Rp. 2.907.336.643.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja barang operasional	1.421.226.504	1.252.063.692	169.162.812	13.51
Belanja Barang persediaan	134.580.400	131.696.400	2.884.000	2.19
Belanja jasa	751.469.821	669.087.131	82.362.690	12.31
Belanja pemeliharaan	1.046.543.734	818.429.420	228.114.314	27.87
Belanja perjalanan dlm negeri	31.522.000	37.540.000	(6.018.000)	(16.03)
Belanja brg non. op.Covid-19	6.812.000	0	6.812.000	100
Realisasi Belanja Bruto	3.392.154.459	2.908.816.643	483.337.816	16.62
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	1.480.000	(1.480.000)	(100)
Realisasi Belanja Netto	3.392.154.459	2.907.336.643	484.817.816	16.68

Belanja Modal
Rp. 262.895.000

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 dan semester II TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 262.895.000 dan Rp. 24.950.960.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11

Perbandingan Belanja Modal 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan mesin	262.895.000	24.950.960	237.944.040	953.65
Realisasi Belanja Bruto	262.895.000	24.950.960	237.944.040	953.65
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	262.895.000	24.950.960	237.944.040	953.65

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp 0.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/ TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 12
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Des 2021	31 Des 2020
1	Saldo UP	0	0
2	Kwitansi UP	0	0
	Jumlah	0	0

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut di brankas sebesar Rp.0, sedangkan di Rekening Bank Rp. 0.

Persediaan Rp
38.243.680

C.1.2. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 38.243.680 dan Rp. 50.891.300. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Persediaan

No.	Uraian	30 Des 2021	31 Des 2020
1	Barang Konsumsi	38.243.680	50.591.300
2	Suku Cadang	0	0
3	Bahan Baku	0	0
4	Persediaan lainnya	0	0
	Total	38.243.680	50.591.300

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi habis pakai.

Aset Tetap Rp.
239.886.501.598.

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp. 239.886.501.598 dan Rp. 244.455.423.423. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Nilai Buku Aset Tetap
Lainnya Rp 0.

C.2.1 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya tersebut berupa Alat Musik Modern. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.3. KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka
Pendek

C.3.1. Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp 0.

C.3.1.a Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 96.263.573 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Uang Muka dari KPPN
Rp 0.

C.3.1.b. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Yang
Ditangguhkan Rp 0.

C.3.1.c. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, penembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 30 Juni 2021.

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp 0.

C.3.1.d Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0 dan Rp. 10.291.667 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

C. 4. EKUITAS

Ekuitas
Rp 239.924.745.278

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 239.924.745.278 dan Rp. 244.399.759.483. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Awal :
Rp.244.399.758.483.

C.4.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.244.399.758.483 dan Rp. 250.420.746.094.

Ekuitas Akhir :
Rp.239.924.745.278

C.4.2. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.239.924.745.278 dan Rp. 244.399.758.483.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp.
141.083.035

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 141.083.035,- dan Rp. 32.253.000,- Rincian Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 14
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)*

No.	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Pendapatan Sewa tanah,gedung dan bangunan	141.083.035	32.253.000	108.830.035	337.42
2.	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	0	10.175.800	(10.175.800)	(100)
Total Pendapatan		141.083.035	36.620.800	104.462.235	337.42

D.2. Beban Pegawai

Beban
Pegawai : Rp
18.246.469.625.

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.246.469.625 dan Rp. 16.635.003.887. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

Tabel 15
Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik(Turun)	%
Beban gaji pokok PNS	6.663.692.100	6.536.339.900	127.352.200	1.94
Beban pembulatan gaji PNS	88.728	86.807	1.921	2.21
Beban Tunj.suami/istri PNS	450.514.402	440.184.365	10.330.037	2.34
Beban tunj.anak PNS	119.764.643	112.502.766	7.261.877	6.45
Beban tunj.struktural PNS	64.750.000	62.275.000	2.025.000	3.22
Beban tunj.fungsional PNS	8.244.425.000	7.115.475.000	1.128.950.000	15.66
Beban tunj.PPh PNS	1.295.372.232	1.017.322.529	278.049.703	27.33
Beban tunj.beras	308.219.520	261.146.520	47.073.000	18.02
Beban uang makan PNS	1.048.323.000	1.038.401.000	9.922.000	0.95
Beban tunj.umum PNS	51.320.000	50.820.000	500.000	0.98
Total Beban Pegawai	18.246.469.625	16.635.003.887	1.611.455.200	95.83

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan: Rp. 103.215.420.

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 103.215.420 dan Rp. 52.760.160. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	103.215.420	52.760.160	50.455.280	95.83
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	103.215.420	52.760.160	50.455.280	95.83

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp. 2.176.346.506.

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.176.346.506 dan Rp. 1.920.990.356. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik(Turun)	%
Beban keperluan perkantoran	1.016.739.804	999.313.442	17.428.362	1.74
Beban Pengiriman surat dinas pos pusat	5.622.800	4.194.000	1.428.800	34.06
Beban honor op.satker	84.720.000	84.720.000	0	0
Beban brg op.lainnya	279.347.400	164.549.550	114.797.850	69.76
Beban brg op.penanganan covid-19	34.795.500	2.256.700	32.539.800	1.441.91
Beban barang non op.penanganan Pandemi covid-19	6.812.000	0	6.812.000	0
Beban langganan listrik	500.115.604	606.597.696	(6.482.082)	(1.08)
Beban langganan listrik	1.723.398	1.858.968	(135.570)	(7.29)
Beban sewa	100.295.000	56.700.000	43.596.000	76.88
Beban jasa lainnya	1.200.000	800.000	400.000	50
Beban asset ekstrakomptabel peralatan & mesin	44.973.000	0	44.973.000	0
Total Beban Jasa	2.176.346.506	1.920.990.356	255.358.150	13.29

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp. 1.090.566.334

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.090.566.334 dan Rp. 858.879.720. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang

sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	572.024.000	524.111.300	47.912.700	9.14
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	95.190.000	11.800.000	83.390.000	706.59
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	379.329.734	282.518.120	96.811.614	34.26
Beban Persediaan bahan utk pemeliharaan	44.012.600	40.450.300	3.562.300	8.30)
Total Beban Pemeliharaan	1.090.566.334	858.879.720	231.676.614	26.97

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp 31.522.000.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 31.522.000 dan Rp. 36.060.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 19
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas dalam kota	1.350.000	2.700.000	(1.350.000)	(50)
Beban Perjalanan Dinas biasa	30.172.000	33.360.000	(3.188.000)	(9.55)
Total Beban Perjalanan Dinas	31.522.000	36.060.000	(4.538.000)	(12.54)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial : Rp.0.

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
6.226.769.171.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.226.769.171 dan Rp. 6.082.798.290. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 20
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31
Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik(Turun)	%
Beban Peny.peralatan & mesin	1.647.992.826	1.504.021.945	143.970.531	9.57
Beban Peny.gedung dan bangunan	4.576.295.845	4.576.295.845	0	0
Beban peny.jaringan	2.480.500	2.480.500	0	0

Total Beban Perjalanan Dinas	6.226.769.171	6.082.798.290	143.970.881	2.36
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain : Rp.0.

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 0.

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 21
Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan/beban dari pelepasan asset non lancar	28.300.000	0	28.300.000	0
Pendapatan/beban dari penyelesaian kewajiban jangka panjang	0	0	0	0
Pendapatan/beban dari kegiatan non operasional lainnya	204	(544.500)	544.704	(100)
Surplus(Defisit) dari Keg.non operasional	28.300.204	(544.500)	28.844.704	(5.297)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp 0.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Untuk periode ini tidak ada beban pos Luar Biasa alias Rp. 0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp.
244.399.759.483* Nilai ekuitas Kantor Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 244.399.759.483 dan Rp. 250.420.746.091.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus (Defisit)
LO Rp.
(27.705.495.817)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. (27.705.495.817) dan Rp. (25.554.783.913). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/ defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Koreksi Rp. 0 Nilai koreksi yang menambah dan atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 2.708.333.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp.
0.* Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0.* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 Dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total	0

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp 63.145.250.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. (63.145.250) dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp 0.

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 2.708.333. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari koreksi atas akrual utang daya dan jasa kepada pihak ketiga.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp 23.293.626.862

Nilai Transaksi antar Entitas Pengadilan Negeri Tangerang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.293.626.862 dan Rp. 19.531.088.972. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 23.
Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(159.091.572)
Ditagihkan ke Entitas Lain	21.949.647.838
Transfer Masuk	4.338.100
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	1.498.732.496
Jumlah	23.293.626.862

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp. 159.091.572 sedangkan DKEL sebesar Rp.21.949.647.838.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Adapun Transaksi Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.338.100 untuk Barang konsumsi dan Rp. 0 untuk Bahan Untuk Pemeliharaan.

Sedangkan, Transaksi Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tidak ada transaksi alias sebesar Rp. 0.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.
239.924.745.278

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 239.924.745.278 dan Rp. 244.399.759.483.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F. 1 KEJADIAN- KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada laporan keuangan ini per 31 Desember 2021 .

F. 2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak ada temuan BPK setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F. 3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Tidak terdapat informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2021.

F. 4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tangerang Satker 097598 adalah :

- 1) PT. BRI (Persero) Tbk.

A/C: BPJ Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Tangerang yang digunakan sebagai Penampung DIPA 097958 : 653240975981000. Saldo pada 31 Desember 2021 sebesar Rp.0

- 2) PT. BRI (Persero) Tbk.

A/C: BPJ Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Tangerang yang digunakan sebagai Penampung DIPA 099077 : 65440990771000. Saldo pada 31 Desember 2021 sebesar Rp.0

- 3) PT. BTN (Persero) Tbk :

A/C A.N : RPL PN Tangerang. Utk PDT Biaya Perkara : 0043-01-30-0008601

F. 5 PENGUNGKAPAN TITIPAN PIHAK KE 3

Uang Titipan Pihak Ke-3 berupa biaya perkara terdiri atas :

- a. Biaya proses/ ATK/Pemberkasan.
- b. Biaya panggilan;
- c. Biaya penerjemah,
- d. Biaya Pemberitahuan;
- e. Biaya Sita;

- f. Biaya Pemeriksaan setempat;
- g. Biaya Sumpah;
- h. Biaya Saksi Ahli;
- i. Biaya Pengiriman;
- j. Biaya Materai
- k. PNBP Biaya pendaftaran, PNBP Redaksi, PNBP lain-lain.
- l. Biaya konsinyasi

Adapun informasi mengenai saldo akhir biaya perkara per 31 Desember 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Saldo di Bank BTN sebesar Rp. 842.357.356.828,78,-

F. 6 PENGUNGKAPAN REVISI DIPA 2021

Selama 2021 terdapat 6 kali revisi DIPA-005-01.3.097598/2021, dua yang terakhir pada tanggal 20 Desember 2021 (Rp.22.838.345.000), 19 Nopember 2021 (Rp22.049.485.000), 14 Oktober 2021 (Rp22.049.485.000), 21 Juli 2021 (21.865.605.000), 31 Mei 2021 (21.865.605.000)

F. 7 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 17/WKMA.NY/ SK/ XII/ 2020 Tanggal 02 Desember 2020 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Negeri Tangerang maka pada tanggal 04 Januari 2021 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan. yaitu:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Rini Sumarningsih, SH., MM.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Dessy Herliani, S.Sos.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Bayu Fitriani Luhung, ST., MH.
Bendahara Pengeluaran	: M.Taofan, SE.
Bendahara Penerimaan	: Nurmalia Anggraini, SE.

F. 8 PENGUNGKAPAN HIBAH LANGSUNG

Terdapat hibah dalam bentuk barang berupa peralatan dan mesin sesuai NPHD: W29.U4/7234/Um.02.02/VIII/2021 dan 114/Tgr.I/PKS/BCSU/VIII/ 2021 tertanggal 18 Agustus 2021 dan telah mendapat Memo Persetujuan Hibah Langsung (MPHL) dari KPPN 127-Tangerang dengan nomor 1075981171 tanggal 10 Nopember 2021.